Jurnal Manajemen Keuangan (MANKEU)
Vol. 4, No. 1, Maret 2026, hlm. 24~33
ISSN 2988-246X, DOI: 10.61167/mnk.v4i1.318

ANALISIS RASIO KEUANGAN PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Suriyan Santi[1], Raju Maulana[2], Bayu Fajar Susanto[3]
[1,2,3]Management Study Program, Faculty of Economics and Business, Universitas Islam Indragiri, Indonesia
*e-mail: suriyansanti78@gmail.com

Article Info

Article history:

Received 03 05, 2026
Revision 03 15, 2026
Received 03 31, 2026

Keywords:

kinerja keuangan daerah, rasio keserasian belanja, rasio belanja operasi, rasio belanja modal, laporan realisasi anggaran.

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2022–2024 berdasarkan rasio belanja operasi dan rasio belanja modal sebagai bagian dari analisis rasio keserasian belanja. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui proporsi alokasi belanja daerah antara belanja yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional organisasi dan belanja yang dialokasikan untuk investasi aset tetap serta sarana dan prasarana yang memberikan manfaat jangka panjang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan berupa data sekunder yang berasal dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2022–2024. Teknik analisis data dilakukan dengan menghitung rasio belanja operasi dan rasio belanja modal, yaitu dengan membandingkan masing-masing jenis belanja terhadap total realisasi belanja pada setiap tahun anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio belanja operasi pada tahun 2022 sebesar 94,15%, tahun 2023 sebesar 93,94%, dan tahun 2024 sebesar 93,64%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran masih dialokasikan untuk membiayai kegiatan operasional organisasi. Sementara itu, rasio belanja modal pada tahun 2022 sebesar 5,85%, meningkat menjadi 6,06% pada tahun 2023, dan kembali meningkat menjadi 6,36% pada tahun 2024. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan investasi melalui pengadaan aset tetap, sarana, dan prasarana pendukung pelayanan publik. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa struktur belanja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir selama periode 2022–2024 masih didominasi oleh belanja operasi, namun terdapat kecenderungan peningkatan proporsi belanja modal dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah mulai mengarahkan kebijakan anggaran pada peningkatan investasi untuk mendukung kualitas pelayanan publik tanpa mengabaikan kebutuhan operasional organisasi.

Jurnal Manajemen Keuangan (MANKEU)
Vol. 4, No. 1, Maret 2026, hlm. 24~33
ISSN 2988-246X, DOI: 10.61167/mnk.v4i1.318

1. INTRODUCTION

Background Problem

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada pencapaian tujuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks otonomi daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dituntut untuk mengelola anggaran secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan prinsip good governance. Pengelolaan anggaran yang baik akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik, khususnya dalam pengembangan sektor perdagangan dan perindustrian yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (Mardiasmo, 2018).

Salah satu pendekatan yang umum digunakan untuk menilai kinerja pengelolaan keuangan sektor publik adalah analisis rasio keuangan daerah. Analisis ini mampu memberikan gambaran mengenai pola alokasi belanja serta prioritas penggunaan anggaran pada suatu dinas. Rasio belanja operasi dan rasio belanja modal merupakan dua indikator penting yang dapat mencerminkan sejauh mana anggaran digunakan untuk mendukung aktivitas operasional rutin dibandingkan dengan investasi pembangunan jangka panjang (Halim & Kusufi, 2021). Oleh karena itu, analisis terhadap kedua rasio tersebut menjadi relevan untuk menilai kinerja keuangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), stabilitas harga, perlindungan konsumen, serta peningkatan daya saing industri daerah. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, dukungan anggaran yang dikelola secara proporsional antara belanja operasi dan belanja modal sangat diperlukan. Belanja operasi digunakan untuk membiayai kegiatan rutin seperti belanja pegawai, barang, dan jasa, sedangkan belanja modal diarahkan untuk pembangunan sarana dan prasarana pendukung perdagangan dan perindustrian yang bersifat jangka panjang (Mahmudi, 2020).

Fenomena yang terjadi pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir menunjukkan bahwa alokasi anggaran cenderung lebih dominan pada belanja operasi dibandingkan belanja modal. Kondisi ini terlihat dari tingginya proporsi belanja pegawai dan belanja barang/jasa dalam struktur APBD dinas, sementara belanja modal yang berkaitan dengan pembangunan pasar, fasilitas industri kecil, serta infrastruktur pendukung perdagangan relatif terbatas. Ketidakseimbangan ini berpotensi menghambat optimalisasi pembangunan sektor perdagangan dan perindustrian secara berkelanjutan, karena belanja modal berperan penting dalam menciptakan nilai tambah ekonomi daerah.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa tingginya rasio belanja operasi dapat mengindikasikan fokus pemerintah daerah pada kegiatan administratif dan pelayanan rutin, namun di sisi lain dapat mencerminkan rendahnya investasi pembangunan apabila tidak diimbangi dengan belanja modal yang memadai. Penelitian oleh Sari dan Putra (2019) menemukan bahwa dominasi belanja operasi pada OPD perdagangan di tingkat kabupaten berdampak pada kurang optimalnya pengembangan infrastruktur pasar daerah. Selanjutnya, Pratama et al. (2021) menyatakan bahwa belanja modal yang rendah berpengaruh terhadap terbatasnya peningkatan kapasitas sektor industri kecil dan menengah. Berbeda dengan penelitian tersebut, Rahman dan Yuliana (2022) menemukan bahwa proporsi belanja operasi yang besar masih dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja pelayanan publik apabila dikelola secara efisien dan tepat sasaran.

Meskipun sejumlah penelitian telah mengkaji rasio belanja operasi dan belanja modal pada berbagai OPD, namun penelitian yang secara spesifik menganalisis kedua rasio tersebut pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir masih terbatas. Selain itu, perbedaan karakteristik daerah, potensi ekonomi lokal, serta kebijakan anggaran daerah menyebabkan hasil penelitian sebelumnya belum tentu dapat digeneralisasikan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang lebih mendalam untuk menganalisis rasio belanja operasi dan rasio belanja modal pada dinas ini guna memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pola pengelolaan keuangan serta implikasinya terhadap pembangunan sektor perdagangan dan perindustrian daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan sebagai upaya memberikan kontribusi empiris dalam mengevaluasi kinerja keuangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir melalui pendekatan analisis rasio belanja operasi dan belanja modal, sekaligus sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan anggaran yang lebih efektif dan berorientasi pada pembangunan jangka panjang

Problem Formulation

Berdasar latar belakang yang telah dikemukakan, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Rasio keuangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir jika di ukur menggunakan rasio belanja operasi dan rasio belanja modal ?

Research purposes

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya , maka tujuan diadakan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Bagaimana Rasio keuangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir jika di ukur menggunakan rasio belanja operasi dan rasio belanja modal.

2. LITERATURE REVIEW

Laporan Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 laporan keuangan daerah merupakan laporan terstruktur yang memuat informasi tentang posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban, yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat, serta suatu organisasi di lingkungan pemerintah pusat atau daerah. Lebih lanjut Abdul Halim (2014) menjelaskan laporan keuangan pemerintah daerah adalah informasi yang memuat data tentang berbagai unsur struktur kekayaan dan struktur finansial yang mencerminkan kinerja ekonomi organisasi pemerintah daerah dalam periode tertentu.

Secara umum tujuan laporan keuangan daerah adalah menampilkan informasi berkaitan dengan posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan perubahan ekuitas pemerintah daerah dalam membuat dan mengevaluasi keputusan dan menentukan alokasi sumber daya (Siti Aliyah & Aida Nahar, 2012). Tujuan laporan keuangan secara spesifik dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yakni menyajikan informasi guna pengambilan keputusan baik keputusan eonomi, sosial, maupun politik serta menilai akuntabilitas suatu pelaporan atas sumber daya yang dialokasikan dengan menyediakan informasi tentang posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, serta ekuitas pemerintah daerah, menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, serta penggunaan sumber daya ekonomi, informasi terkait kepatuhan realisasi terhadap anggaran yang telah ditetapkan, bagaimana entitas pelaporan mendanai kegiatannya dan memenuhi kebutuhan kasnya, informasi potensi pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan kegiatan pemerintahan serta bermanfaat untuk menguji kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatannya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, komponen Laporan Keuangan Pemerintah adalah sebagai berikut:

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
c. Neraca
d. Laporan Operasional
e. Laporan Arus kas
f. Laporan perubahan ekuuitas
g. Catatan atas laporan keuangan

Analisis Rasio Keuangan Daerah

Rasio Keserasian belanja

Rasio keserasian belanja merupakan rasio yang digunakan untuk menilai proporsi alokasi belanja daerah antara belanja operasi dan belanja modal. Rasio ini mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah atau dinas mampu menyeimbangkan kebutuhan pembiayaan kegiatan operasional dengan investasi jangka panjang yang mendukung pembangunan daerah. Rasio keserasian belanja penting untuk dianalisis karena struktur belanja yang tidak seimbang dapat mengindikasikan lemahnya orientasi pembangunan atau sebaliknya, kurang optimalnya pelayanan publik sehari-hari. Menurut Halim dan Kusufi (2021), rasio keserasian belanja adalah rasio yang menggambarkan keseimbangan antara belanja operasi dan belanja modal dalam struktur belanja pemerintah daerah. Rasio ini digunakan untuk menilai prioritas kebijakan anggaran daerah, apakah lebih berorientasi pada pelayanan rutin atau pada pembangunan dan investasi jangka panjang. Selanjutnya, Mahmudi

Jurnal Manajemen Keuangan (MANKEU)
Vol. 4, No. 1, Maret 2026, hlm. 24~33
ISSN 2988-246X, DOI: 10.61167/mnk.v4i1.318

(2020) menyatakan bahwa rasio keserasian belanja merupakan indikator kinerja keuangan daerah yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran secara proporsional antara kebutuhan operasional dan kebutuhan pembangunan. Struktur belanja yang seimbang mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang sehat dan berorientasi pada keberlanjutan fiskal.

Menurut Sari dan Putra (2019) dalam penelitian keuangan sektor publik, rasio keserasian belanja digunakan untuk menilai tingkat keharmonisan kebijakan belanja daerah. Rasio ini dapat menunjukkan kecenderungan pemerintah daerah dalam mengelola anggaran, apakah lebih menitikberatkan pada belanja pegawai dan barang/jasa atau pada belanja modal yang memberikan manfaat ekonomi jangka panjang. Lebih lanjut, Pratama, Nugroho, dan Lestari (2021) mendefinisikan rasio keserasian belanja sebagai ukuran yang menggambarkan efektivitas perencanaan anggaran daerah dalam mendukung pembangunan sektor-sektor strategis. Rasio belanja modal yang terlalu rendah dibandingkan belanja operasi menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan infrastruktur.

Rasio Belanja Operasi

Rasio belanja operasi merupakan salah satu indikator dalam analisis rasio keuangan daerah yang digunakan untuk mengukur proporsi belanja operasi terhadap total belanja pemerintah daerah atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Belanja operasi mencakup seluruh pengeluaran yang bersifat rutin dan berulang dalam satu periode anggaran, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Rasio ini penting dianalisis karena mencerminkan sejauh mana anggaran daerah digunakan untuk mendukung kelangsungan operasional dan pelayanan publik sehari-hari.

Secara teoritis, rasio belanja operasi digunakan untuk menilai struktur dan prioritas kebijakan anggaran pemerintah daerah. Rasio belanja operasi yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran dialokasikan untuk membiayai aktivitas rutin dan administratif, yang pada satu sisi diperlukan untuk menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Namun, apabila rasio belanja operasi terlalu dominan dan tidak diimbangi dengan belanja modal yang memadai, kondisi ini dapat mengindikasikan rendahnya orientasi pemerintah daerah terhadap pembangunan dan investasi jangka panjang.

Rumus dari rasio belanja operasi Adalah :

$$\text{Rasio belanja operasi} : \frac{\text{Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

Rasio belanja operasi idealnya tidak terlalu tinggi, karena belanja operasi bersifat habis pakai dan tidak memberikan manfaat ekonomi jangka panjang secara langsung. Menurut Halim dan Kusufi (2021), struktur belanja daerah yang sehat ditandai dengan belanja operasi yang terkendali dan diimbangi dengan belanja modal yang memadai untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Standar yang di tetapkan Adalah :

Tabel 1. Standar rasio belanja operasi

Rasio belanja operasi	interpretasi
≤ 60%	Sangat baik, menunjukkan orientasi pembangunan dan investasi tinggi
61% – 70%	Baik, struktur belanja relatif seimbang
71% – 80%	Cukup, belanja rutin mulai dominan
> 80%	Kurang baik, belanja operasi terlalu dominan

Sumber : Halim dan Kusufi (2021)

Rasio belanja Modal

Rasio belanja modal merupakan salah satu indikator dalam analisis rasio keuangan daerah yang digunakan untuk mengukur proporsi belanja modal terhadap total belanja pemerintah daerah atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan untuk memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, seperti

Jurnal Manajemen Keuangan (MANKEU)
Vol. 4, No. 1, Maret 2026, hlm. 24~33
ISSN 2988-246X, DOI: 10.61167/mnk.v4i1.318

pembangunan gedung, pengadaan peralatan, infrastruktur, serta sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik dan kegiatan pembangunan daerah. Secara konseptual, rasio belanja modal mencerminkan orientasi kebijakan anggaran pemerintah daerah terhadap pembangunan dan investasi jangka panjang. Rasio belanja modal yang tinggi menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas pelayanan publik, memperkuat infrastruktur, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Sebaliknya, rasio belanja modal yang rendah dapat mengindikasikan bahwa alokasi anggaran lebih banyak difokuskan pada belanja rutin, sehingga berpotensi menghambat upaya pembangunan dan peningkatan daya saing daerah.

Rumus dari rasio belanja modal Adalah :

$$\text{Rasio belanja modal} : \frac{\text{Belanja modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

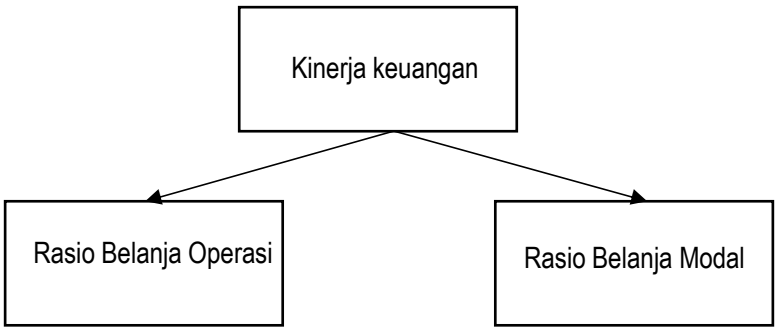
Rasio belanja modal yang ideal umumnya berada pada kisaran minimal 20% dari total belanja, karena belanja modal berfungsi sebagai investasi publik yang memberikan manfaat jangka panjang. Halim dan Kusufi (2021) menyatakan bahwa belanja modal yang memadai mencerminkan komitmen pemerintah daerah terhadap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Standar yang di tetapkan Adalah :

Tabel 2. Standar rasio belanja modal

Rasio belanja modal	interpretasi
≥ 20%	Sangat baik, menunjukkan orientasi pembangunan dan investasi tinggi
15% – 19%	Baik, belanja modal cukup mendukung pembangunan
10% – 14%	Cukup, belanja modal masih terbatas
< 10%	Kurang baik, belanja modal sangat rendah

Sumber : Halim dan Kusufi (2021)

Research Framework



Gambar 1. Kerangka Berpikir
(Data: Disusun Oleh Peneliti)

Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan didukung oleh landasan teoritis yang telah dikemukakan, selanjutnya dapat penulis kemukakan dan mengambil hipotesis sementara sebagai berikut:

a. Diduga Dinas perdagangan dan perindustrian Kab.Inhil memiliki rasio belanja operasi kurang baik.
b. Diduga Dinas perdagangan dan perindustrian Kab.Inhil memiliki rasio belanja modal kurang baik.

3. RESEARCH METHOD

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis kondisi kinerja keuangan berdasarkan data laporan keuangan secara sistematis, objektif, dan terukur. Penelitian kuantitatif menekankan penggunaan data berupa angka yang dianalisis untuk memperoleh

gambaran terhadap suatu fenomena atau objek penelitian[16]. Analisis dilakukan dengan menghitung rasio belanja operasi dan belanja modal.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat pada Kantor Dinas perdagangan dan perindustrian Kabupaten Indragiri hilir, Dengan waktu Penelitian dilaksanakan terhitung dari Desember 2025 sampai Selesai.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan daerah pada Kantor Dinas perdagangan dan perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir pada Tahun 2022 - 2024.

Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Menurut [21] variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. penulis melakukan pengujian dengan dua variabel, yaitu sebagai berikut :

Variabel independen (X)

Menurut [21] Variabel Independen adalah variabel yang mempengaruhi suatu yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Maka yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah Rasio belanja operasi dan belanja modal.

Variabel dependen (Y)

Menurut [21] Variabel Dependen atau variable terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas/ dependen. Sesuai dengan masalah yang akan diteliti yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kinerja Keuangan

Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diinginkan peneliti mencari informasi yang berhubungan dengan masalah, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Studi dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumen merupakan cara memperoleh data melalui sumber tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah laporan keuangan Kantor Dinas perdagangan dan perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir pada Tahun 2022 - 2024.

b. Studi pustaka

Studi Pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaa terhadap berbagai buku, literatur, catatan serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Pada penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data pada buku-buku atau literature pustaka dan jurnal ilmiah, dengan maksud memperoleh landasan teoritis yang berhubungan dengan objek [22].

Analisis Data

Menurut [21] analisis data adalah kegiatan setelah seluruh data terkumpul.Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteiliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah dilakukan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis rasio keuangan pemerintah daerah diantaranya:

1. Rasio Belanja Operasi

Rasio Belanja Operasi digunakan untuk mengukur proporsi belanja operasi terhadap total belanja daerah. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

Rasio Belanja Operasi = (Belanja Operasi / Total Belanja Daerah) × 100%

2. Rasio Belanja Modal

Jurnal Manajemen Keuangan (MANKEU)
Vol. 4, No. 1, Maret 2026, hlm. 24~33
ISSN 2988-246X, DOI: 10.61167/mnk.v4i1.318

Rasio Belanja Modal digunakan untuk mengukur proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

Rasio Belanja Modal = (Belanja Modal / Total Belanja Daerah) × 100%

4. RESEARCH RESULTS AND DISCUSSION

Research result

Menurut Halim [20], kinerja keuangan atau kemampuan keuangan daerah merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, perlu dilakukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) [1]. Mahmudi (2010) menjelaskan bahwa terdapat beberapa analisis rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan daerah. Rasio-rasio tersebut dikembangkan berdasarkan data keuangan yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), meliputi Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Pertumbuhan, dan Rasio Keserasian. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan analisis pada Rasio Keserasian, khususnya melalui analisis Rasio belanja operasi dan rasio belanja modal, dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Perhitungan Rasio Belanja Operasi

Rasio Belanja Operasi menggambarkan tingkat prioritas pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan operasional pemerintahan selama satu tahun anggaran. Hasil perhitungan Rasio Belanja Operasi pada Dinas perdagangan dan perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3. Rasio Belanja Operasi Dinas Perdagangan dan perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir

Tahun	belanja operasi	total belanja	Ratio (%)
2022	**8.220.362.346,62**	**8.731.425.845,62**	**94,15%**
2023	**8.751.629.059,44**	**9.316.626.669,44**	**93,94%**
2024	**9.239.928.207,18**	**9.867.842.913,18**	**93,64%**

Source: Olahan data penulis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio belanja operasi pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2022 sebesar 94,15%, tahun 2023 sebesar 93,94%, dan tahun 2024 sebesar 93,64%. Persentase tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran belanja dialokasikan untuk membiayai kegiatan operasional organisasi, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Meskipun rasio belanja operasi masih mendominasi total belanja, terjadi penurunan secara bertahap selama periode penelitian. Penurunan ini menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah untuk mulai meningkatkan proporsi belanja yang bersifat produktif, meskipun belum terlalu signifikan. Komposisi tersebut masih tergolong wajar mengingat Dinas Perdagangan dan Perindustrian merupakan perangkat daerah yang lebih banyak melaksanakan fungsi pelayanan dan pembinaan dibandingkan pembangunan infrastruktur berskala besar.

2. Perhitungan Rasio Belanja Modal

Rasio Belanja Modal menunjukkan tingkat perhatian pemerintah daerah terhadap investasi jangka panjang dalam bentuk aset tetap yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hasil perhitungan Rasio Belanja Modal disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4. Rasio belanja modal Dinas Perdagangan dan perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir

Tahun	belanja modal	total belanja	Ratio (%)
2022	**511.063.499,00**	**8.731.425.845,62**	**5,85%**
2023	**564.997.610,00**	**9.316.626.669,44**	**6,06%**
2024	**627.914.706,00**	**9.867.842.913,18**	**6,36%**

Source: Olahan data penulis.

Rasio belanja modal pada tahun 2022 sebesar 5,85%, meningkat menjadi 6,06% pada tahun 2023, dan kembali meningkat menjadi 6,36% pada tahun 2024. Kenaikan tersebut menunjukkan adanya peningkatan alokasi anggaran untuk pengadaan aset tetap, peralatan, sarana dan prasarana pendukung pelayanan, serta investasi pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka panjang. Walaupun proporsi belanja modal masih relatif kecil dibandingkan belanja operasi, tren peningkatan tersebut menunjukkan adanya perhatian pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas fasilitas dan infrastruktur pendukung pelayanan publik. Peningkatan belanja modal diharapkan dapat memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan program di bidang perdagangan dan perindustrian.

5. CONCLUSION

Berdasarkan hasil analisis rasio belanja operasi dan rasio belanja modal pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2022–2024, dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Hasil perhitungan rasio belanja operasi menunjukkan bahwa pada tahun 2022 sebesar 94,15%, tahun 2023 sebesar 93,94%, dan tahun 2024 sebesar 93,64%. Persentase tersebut menunjukkan bahwa struktur belanja Dinas Perdagangan dan Perindustrian masih didominasi oleh belanja operasi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian besar anggaran digunakan untuk mendukung kegiatan operasional organisasi, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta pelaksanaan program dan pelayanan kepada masyarakat. Meskipun demikian, terjadi penurunan rasio belanja operasi dari tahun ke tahun yang menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah untuk menyeimbangkan komposisi belanja.
b. Hasil perhitungan rasio belanja modal menunjukkan bahwa pada tahun 2022 sebesar 5,85%, meningkat menjadi 6,06% pada tahun 2023, dan kembali meningkat menjadi 6,36% pada tahun 2024. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam menambah investasi melalui pengadaan aset tetap, sarana, prasarana, dan peralatan pendukung pelayanan. Walaupun proporsi belanja modal masih relatif kecil dibandingkan belanja operasi, tren peningkatan ini menunjukkan arah kebijakan anggaran yang semakin memperhatikan pembangunan kapasitas dan kualitas pelayanan publik.

Secara keseluruhan, struktur belanja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir selama periode 2022–2024 masih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan operasional organisasi. Namun, peningkatan proporsi belanja modal dari tahun ke tahun menunjukkan adanya upaya untuk memperkuat penyediaan sarana dan prasarana yang dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan serta kinerja organisasi pada masa yang akan datang.

6. SUGGESTION

Berdasarkan hasil penelitian mengenai rasio belanja operasi dan rasio belanja modal pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2022–2024, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

a. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas perencanaan anggaran sehingga komposisi belanja menjadi lebih seimbang antara belanja operasi dan belanja modal. Pengalokasian anggaran yang proporsional akan mendukung terciptanya pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan berorientasi pada hasil.
b. Pemerintah daerah perlu meningkatkan proporsi belanja modal secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Penambahan alokasi belanja modal dapat diarahkan pada pengadaan peralatan, pengembangan sarana dan prasarana perdagangan, revitalisasi fasilitas pelayanan, serta penyediaan infrastruktur pendukung yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
c. Efisiensi belanja operasi perlu terus ditingkatkan melalui pengendalian biaya operasional, optimalisasi penggunaan sumber daya, serta evaluasi terhadap program dan kegiatan yang memiliki tingkat efektivitas rendah. Langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan ruang fiskal yang lebih besar untuk membiayai belanja yang bersifat produktif.

d. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menganalisis rasio keserasian belanja dengan periode penelitian yang lebih panjang dan mengombinasikannya dengan rasio keuangan daerah lainnya, seperti rasio efektivitas, efisiensi, kemandirian, pertumbuhan, dan keserasian secara menyeluruh. Dengan demikian, hasil penelitian akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kinerja keuangan perangkat daerah.

BIBLIOGRAPHY

[1] L. R. Harianja, S. Sugianto, and A. N. Daulay, "Systematic Literatur Riview: Analisis Transformasi Digital Industri Asuransi Potensi (Insurtech) di Indonesia," *J. Manaj. Terap. dan Keuang.*, vol. 13, no. 2, pp. 466–480, 2024, doi: 10.22437/jmk.v13i02.33280.
[2] H. Hernita, A. N. Daulay, and F. A. Lubis, "Pengaruh Peran Digitalisasi dan Transformasi Digital terhadap Kinerja Asuransi di PT," *Chubb Life Insur. Medan. J. Manaj. Terap. dan Keuang.*, vol. 13, no. 4, pp. 1393–1404, 2024, doi: 10.22437/jmk.v13i04.38609.
[3] S. Wulandari and A. Alfifto, "Pengaruh Analisis Rasio Keuangan terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Asuransi yang Go Public di BEI: Studi Kasus PT Asuransi Jasa Tania Periode 2019–2023," *J. Bisnis Mhs.*, vol. 5, no. 2, pp. 604–614, 2025, doi: 10.60036/jbm.536.
[4] M. Makmur, M. Taufiq, F. Fadlina, K. Kurniawan, and B. R. Mas'ud, "Analisis Rasio Keuangan pada Perusahaan Asuransi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia," *Innov. J. Soc. Sci. Res.*, vol. 4, no. 5, pp. 6749–6757, 2024, doi: 10.31004/innovative.v4i5.15754.
[5] D. Widyani, "The impact of InsurTech on the insurance business model in Indonesia," *Int. J. Financ. Syst.*, 2023.
[6] A. Harjito and Martono, *Manajemen Keuangan. Edisi Kedua*. Yogyakarta: EKONISIA, 2005.
[7] M. J. F. Esomar and R. Christianty, "Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Sektor Jasa di BEI," *JKBM (Jurnal Konsep Bisnis dan Manaj.*, vol. 7, no. 2, pp. 227–233, 2021, doi: 10.31289/jkbm.v7i2.5266.
[8] I. A. Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2015.
[9] R. Oktalia, R. M. Valianti, and O. Oktariansyah, "Analisis Kinerja Keuangan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung," *J. Media Akunt. (Mediasi*, vol. 2, no. 2, pp. 111–135, 2020.
[10] I. Fahmi, *Manajemen Keuangan Perusahaan dan Pasar Modal*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.
[11] S. Sanjaya and M. F. Rizky, "Analisis Profitabilitas dalam Menilai Kinerja Keuangan pada PT. Taspen (Persero) Medan," *KITABAH J. Akunt. dan Keuang. Syariah*, vol. 2, no. 2, pp. 278–293, 2018.
[12] S. S. Harahap, *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan. Cetakan ke-14*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
[13] Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Kencana, 2010.
[14] Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
[15] E. Tandelilin, *Pasar Modal: Manajemen Portofolio dan Investasi*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2021.
[16] K. Abdullah *et al.*, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini., 2022.
[17] Hery, *Analisis Laporan Keuangan*, Integrated. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2023.
[18] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
[19] I. Machali, *Metode Penelitian Kuantitatif: Panduan Praktis Merencanakan, Melaksanakan, dan Analisis dalam Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.
[20] N. Suriani, R. Risnita, and M. S. Jailani, "Konsep populasi dan sampling serta pemilihan partisipan ditinjau dari penelitian ilmiah pendidikan," *IHSAN J. Pendidik. Islam*, vol. 1, no. 2, pp. 24–36, 2023.
[21] Sugiyono, *Metode Penelitian KOMBINASI (Mixed Methods*. Bandung: Alfabeta.
[22] Z. Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV Syakir Media Press, 2021.